

**PENYELESAIAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN NAFKAH *'IDDAH*
DAN *MUT'AH* OLEH SUAMI KEPADA ISTRI DALAM PERKARA
CERAI TALAK DI PENGADILAN AGAMA PADANG**

SKRIPSI

**Diajukan sebagai Salah Satu Syarat
guna Meraih Gelar Sarjana Hukum
pada Jurusan Hukum Keluarga**



**Oleh:
HARIRI OCVIANI ARMA
1413010568**

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL
PADANG
2018 M / 1439 H**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul "*Penyelesaian Kewajiban Pembayaran Nafkah 'Iddah dan Mut'ah oleh Suami Kepada Istri Dalam Perkara Cerai Talak Di Pengadilan Agama Padang*" yang disusun oleh Hariri Ocviani Arma BP. 1413010568 telah memenuhi persyaratan ilmiah, dan disetujui untuk diajukan ke sidang munaqasyah.

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Pembimbing I



Dr. Asrina M.Ag
NIP. 197407071998032002

Padang, 09 Agustus 2018
Pembimbing II



Aulia Rahmat, S.H.L. M.A.Hk
NIP. 198701082015031004

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul **Penyelesaian Kewajiban Pembayaran Nafkah 'Iddah dan Mut'ah oleh Suami Kepada Istri dalam Perkara Cerai Talak di Pengadilan Agama Padang** ditulis oleh **Hariri Ocviani Arma, NIM 1413010568** pada Jurusan Hukum Keluarga, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang, tahun 2018. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pembayaran nafkah *'iddah dan mut'ah* sebelum ikrar talak pada PA Padang. Idealnya eksekusi baru dapat dilaksanakan jika sebuah produk hukum sudah memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht*), akan tetapi, kondisi ini tidak berlaku pada kasus cerai talak yang diputus oleh hakim di Pengadilan Agama Padang.

Rumusan masalah penelitian adalah bagaimana upaya penyelesaian kewajiban pembayaran nafkah *'iddah dan mut'ah* oleh suami kepada istri dalam perkara cerai talak di Pengadilan Agama Padang. Adapun pertanyaan penelitian yang diajukan adalah bagaimana pelaksanaan pembayaran nafkah *'iddah dan mut'ah* di Pengadilan Agama Padang, apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menentukan cara pembayaran nafkah *'iddah dan mut'ah* serta bagaimana akibat hukum apabila suami tidak membayarkan nafkah *'iddah dan mut'ah*.

Penelitian merupakan penelitian wilayah (*social legal research*), sumber data yang digunakan adalah data primer berupa putusan Pengadilan Agama Padang serta data sekunder berupa buku, buku dan karya ilmiah yang berkaitan dengan tema permasalahan yang diteliti serta wawancara para hakim di Pengadilan Agama Padang, teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara dan dokumentasi, teknik analisis data menggunakan metode *content analysis* (kajian isi).

Temuan penelitian adalah pertama, praktik pembayaran nafkah *'iddah dan mut'ah* di Pengadilan Agama Padang terlaksana melalui dua cara yaitu secara tunai dan secara cicilan dalam artian ditangguhkan. Kedua, kebijakan hakim di Pengadilan Agama Padang memerintahkan suami untuk memberikan nafkah istri sebelum ikrar talak tidak mempunyai dasar pertimbangan dalam perundang-undangan. Hal tersebut adalah sebuah kebijakan untuk menjamin hak-hak mantan istri setelah diceraikan suaminya. Ketiga, jika kebijakan tersebut tidak diperintahkan atas hakim, dikhawatirkan suami melalaikan kewajibannya membayar nafkah *'iddah dan mut'ah* istri sebagai kompensasi diabulkannya permohonan izin mentalak istri.

ABSTRACT

This thesis is entitled **The Settlement of Payment Obligations for *'iddah* and *Mut'ah* by Husband to Wife in Divorce in the Padang Religion Court** written by **Hariri Ocviani Arma, NIM 1413010568** in the Department of Family Law, Syari'ah Faculty, Imam Bonjol State Islamic University, year 2018. This Research was motivated by the practice of paying *'iddah* and *mut'ah* living before the pledge of divorce in the Padang Religious Court. Ideally the new execution can be carried out if a legal product has permanent legal force (*inkracht*). However, this condition does not apply in some case of divorce, which was decided by a judge at the Padang Religious Court.

The formulation of the research problem is how the effort to settle the payment obligations of the *'iddah* and *mut'ah* living by the husband to his wife in the divorce case in the Padang Religious Court. The research question put forward is how to implement payment of *iddah* and *mut'ah* living in Padang Religious Court, what is the basis of judges consideration in determining the payment method for *iddah* and *mut'ah* living and what is the legal consequence if the husband does not pay *'iddah* and *mut'ah*.

This research is social legal research, the data sources used are primary data in the form of the Padang Religious Court decision and secondary data in the form of books and scientific works related to the them of the problem under study and interviews of judges in the Padang Religious Court. Data collection in the form of observation, interviews and documentation, data analysis techniques using content analysis method.

The findings of this research are first, the practice of paying *'iddah* and *mut'ah* living in the Padang Religious Court is carried out in two ways, namely in cash and in installments in the sense of being deferred. Second, the judge's policy in the Padang Religious Court ordered the husband to provide his wife with a living before the pledge of divorce did not have a basis for consideration in the legislation. It is a policy to guarantee the rights of ex-wife after divorcing her husband. Third, if the policy is not ordered by the judge, it is feared that the husband neglects his obligation to pay for his wife's *'iddah* and *mut'ah* as compensation for the wife's mental permission.